

Pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat Randu Makmur pada Pengelolaan Sampah di TPST Kedungrandu, Kabupaten Banyumas

Rahmi Paramita Wisalyaharini 1, Grendi Hendrastomo 2

Universitas Negeri Yogyakarta

Email : rahmiparamita.2021@student.uny.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses, tantangan, dan dampak pemberdayaan KSM Randu Makmur dalam pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Teknik pengambilan informan dilakukan melalui purposive sampling dengan informan berupa ketua, anggota, tenaga administrasi, dan pelanggan KSM Randu Makmur. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di TPST Kedungrandu, tetapi belum ada penelitian yang berfokus pada pemberdayaan KSM Randu Makmur. Hal itulah yang menjadi celah dan kebaruan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan KSM Randu Makmur melibatkan berbagai pihak dan tahapan. Terdapat berbagai tantangan dihadapi pada proses pemberdayaan yang meliputi tantangan internal dan tantangan eksternal. Pemberdayaan KSM Randu Makmur ini memberikan berbagai dampak yang meliputi dampak terhadap individu dan masyarakat serta dampak pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Kelompok Swadaya Masyarakat, Pengelolaan Sampah

Empowerment of The Randu Makmur Community Self-Help Group in Waste Management at Kedungrandu TPST, Banyumas Regency

Rahmi Paramita Wisalyaharini 1, Grendi Hendrastomo 2

Universitas Negeri Yogyakarta

Email : rahmiparamita.2021@student.uny.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the process, challenges, and impact of empowering KSM Randu Makmur in waste management at the Kedungrandu TPST, Patikraja District, Banyumas Regency. This study uses a qualitative research method with a case study type. Data collection techniques included interviews and observations. Informant selection was carried out through purposive sampling, with informants including the chairperson, members, administrative staff, and customers of KSM Randu Makmur. The data validity test used was source and technique triangulation. Then, the data analysis technique used was Creswell's. There have been several previous studies conducted at the Kedungrandu TPST, but none have focused on the empowerment of KSM Randu Makmur. This is the gap and novelty of this study. The results of this study show that the empowerment process of KSM Randu Makmur involves various parties and stages. There are various challenges faced in the empowerment process, including internal challenges and external challenges. The empowerment of KSM Randu Makmur has various impacts, including impacts on individuals and society, as well as impacts on social, economic, environmental, and health aspects.

Keywords: Empowerment, Community self-help Groups, Waste management

Pendahuluan

Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia yaitu sampah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, Indonesia menghasilkan timbulan sampah yang terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, persentase jumlah sampah tidak terkelola di 342 kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2024 sebesar 67,8% atau sebanyak 25.297.270,65 ton yang menunjukkan tingginya jumlah sampah yang tidak terkelola. Sampah masih menjadi masalah yang sulit diatasi hingga saat ini dan terus menggunung dari tahun ke tahun. Masalah sampah tidak hanya berkaitan dengan volumenya yang terus meningkat, akan tetapi juga berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Pokok masalah sampah adalah bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan (Fadzoli, et al., 2023:30). Namun, selama ini pengelolaan sampah belum berjalan dengan optimal sehingga menimbulkan dampak negatif pada berbagai aspek. Dampak negatif dari sampah terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem mencakup pencemaran air dan tanah serta peningkatan resiko penyakit (Lingga, et al., 2024:12235). Selain itu, penanganan sampah yang tidak komprehensif juga memicu masalah sosial seperti amuk massa, bentrok antarwarga, dan pemblokiran TPA (Hendra, 2016:78).

Berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta berbagai peraturan pemerintah. Dalam hal ini, terdapat ketidaksesuaian antara undang-undang yang berlaku dan implementasinya. Pada Pasal 44 dijelaskan bahwa pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lama 5 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang tersebut atau pada tahun 2013. Namun, sampai saat ini sistem pembuangan terbuka masih banyak digunakan di berbagai wilayah Indonesia dengan menumpuk sampah tanpa perlakuan khusus (Yulianti, 2024:1227). Lebih dari 300 dari total 500 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia tidak memenuhi standar pengelolaan dan masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (Sari, et al., 2025:290). Padahal sistem tersebut menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah serta menyebabkan masalah kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, diare, dan penyakit kulit (Yulianti, et al., 2024:1226). Banyak TPA yang pada akhirnya mengalami kelebihan kapasitas dan darurat TPA sehingga berujung pada penutupan TPA dan darurat sampah di berbagai wilayah Indonesia, seperti penutupan TPA Piyungan di Kabupaten Bantul pada pertengahan tahun 2024 dan TPA Basirih di Kota Banjarmasin pada awal tahun 2025. Fenomena serupa juga pernah terjadi di Kabupaten Banyumas seperti penutupan TPA Gunung Tugel pada tahun 2016 dan TPA Kaliori pada tahun 2018 (Ma'rup, et al., 2023:810).

Penutupan TPA merupakan sebuah bentuk kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, akan tetapi jika tidak ditindaklanjuti dengan baik maka menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari TPA seperti pemulung. Pemulung termasuk salah satu kelompok masyarakat marginal yang mengais tumpukan sampah di TPA untuk mencari dan menjual kembali barang bekas, akan tetapi ketika TPA ditutup maka pemulung kehilangan mata pencahariannya. Pada masa penutupan TPA di Kabupaten Banyumas pun banyak pemulung yang terdampak seperti terjadi di daerah yang sudah atau akan melakukan penutupan TPA. Namun, hal yang menarik adalah penutupan TPA di Kabupaten Banyumas ditindaklanjuti dengan kebijakan pengelolaan sampah bernama Sumpah Beruang (Sulap Sampah Berubah Uang) yang memberdayakan pemulung sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Terdapat banyak KSM di Kabupaten Banyumas yang beroperasi di berbagai Pusat Daur Ulang (PDU) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),

salah satunya yaitu KSM Randu Makmur sebagai pengelola sampah di TPST Kedungrandu. Mayoritas anggota KSM tersebut merupakan mantan pemulung TPA Gunung Tugel yang telah diberdayakan sehingga menjadi berdaya, mandiri, dan mampu menghasilkan uang sendiri dari proses pengelolaan sampah tanpa digaji oleh pemerintah.

KSM Randu Makmur menjadi contoh nyata bagaimana kelompok masyarakat marginal seperti pemulung dilibatkan, diberdayakan, dan bertransformasi menjadi subjek aktif pada kegiatan pengelolaan sampah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh KSM Randu Makmur dapat dikatakan efektif dan mampu mengelola sampah terbanyak di Kabupaten Banyumas (Kusuma, 2023). Selain itu, terdapat berbagai penelitian sebelumnya yang membahas pemberdayaan masyarakat marginal termasuk pemulung. Pemberdayaan pemulung di TPA Desa Pabbenteng Kabupaten Gowa menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak serta proses pemberdayaan yang dihadapkan pada berbagai tantangan berkaitan dengan kesadaran dan tingkat pendidikan pemulung, partisipasi pemerintah desa, dan fasilitas pendukung (Wahab, 2017:100). Kemudian, pemberdayaan pemulung di Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar berhasil meningkatkan kemandirian dan kondisi sosial ekonomi pemulung serta menghilangkan diskriminasi terhadap pemulung (Fitrah, et al., 2022:813). Pemberdayaan pemulung melalui pengembangan produk daur ulang di TPST Bantar Gebang Bekasi juga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup pemulung (Yanti, et al., 2024:107). Dalam hal ini, pemberdayaan sosial dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial kelompok masyarakat marginal (Wulandari, et al., 2025:125).

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat marginal pada pengelolaan sampah terdapat proses dan tantangan yang dihadapi serta dampak yang ditimbulkan. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan di TPST Kedungrandu, akan tetapi belum terdapat penelitian yang berfokus pada proses, tantangan, dan dampak pemberdayaan KSM Randu Makmur. Selain itu, meskipun terdapat berbagai penelitian sebelumnya mengenai pemberdayaan masyarakat marginal berupa pemulung, belum terdapat penelitian yang dilatarbelakangi oleh penutupan TPA yang berdampak pada kehidupan pemulung. Beberapa hal itulah yang menjadi celah penelitian yang akan diisi. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji kegiatan pengelolaan sampah oleh KSM Randu Makmur akan tetapi juga menunjukkan transformasi pemulung TPA Gunung Tugel menjadi KSM Randu Makmur dari adanya pemberdayaan KSM tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat Kementerian Lingkungan Hidup telah mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat peringatan kepada 306 pemerintah daerah terkait praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai prosedur (Sari, et al., 2025:290). Dalam hal ini, banyak TPA dengan sistem pembuangan terbuka akan ditutup dan berdampak pada kehidupan pemulung. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu yang memberdayakan pemulung terdampak penutupan TPA perlu dikaji lebih dalam dan diterapkan di daerah yang sudah atau akan melakukan penutupan TPA agar dapat mengatasi masalah sampah pada aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses, tantangan, dan dampak pemberdayaan KSM Randu Makmur dalam pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu, Kabupaten Karanganyar.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada pemahaman terhadap fenomena dengan latar alamiah (naturalistik) untuk menangkap dan memahami secara rinci, mendalam, dan utuh (holistic) terhadap dinamika kehidupan sosial yang

unik, spesifik dan kompleks (Karsadi, 2022:24). Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan topik dan tujuan penelitian yang meneliti fenomena secara rinci, mendalam, dan utuh terhadap kehidupan sosial yang unik, spesifik, dan kompleks mengenai pemberdayaan KSM Randu Makmur pada pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, atau aktivitas pada satu orang atau lebih dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dilakukan secara berkesinambungan (Creswell, 2009 dalam Sugiyono, 2022:680). Studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan topik dan tujuan penelitian yang melakukan eksplorasi secara mendalam menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data kualitatif berupa wawancara dan observasi mengenai fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, yaitu proses, tantangan, dan dampak dari sebuah program pemberdayaan KSM dalam pengelolaan sampah.

Teknik pengambilan informan penelitian ini dilakukan melalui nonprobability sampling berupa purposive sampling, artinya informan dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, seperti orang-orang yang paling memahami topik dan rumusan masalah penelitian ini. Informan penelitian ini berjumlah 10 orang yang meliputi 1 ketua, 5 anggota, 1 tenaga administrasi, dan 3 pelanggan KSM Randu Makmur. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung di lokasi penelitian berupa data hasil wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka, termasuk penelitian-penelitian relevan sebagai data pendukung atau pembanding serta referensi penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang berkembang ketika proses wawancara serta alat bantu seperti alat tulis, perekam suara, dan kamera. Selain itu, teknik pengumpulan data penelitian ini juga dilakukan melalui observasi non partisipasi, artinya peneliti hanya sebagai observer tanpa melibatkan diri secara langsung ke dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau orang yang diamati (Karsadi, 2022:106).

Uji keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik karena data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber serta menggunakan berbagai teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber (Sugiyono, 2022:636). Pada penelitian ini, peneliti mengecek kembali dan membandingkan data dari ketua, anggota, tenaga administrasi, serta pelanggan KSM Randu Makmur. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2022:637). Pada penelitian ini, peneliti mengecek kembali dan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data dari Creswell yang meliputi: mengorganisasi dan menyiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, melakukan coding (pengkodean) terhadap seluruh data, menghasilkan deskripsi dan tema untuk dianalisis, serta menyajikan kembali dan menginterpretasi deskripsi dan tema tersebut dalam laporan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses observasi dan wawancara dengan ketua, anggota, tenaga administrasi, dan pelanggan KSM Randu Makmur, serta proses pengolahan data. Sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, hasil penelitian disajikan dalam tiga aspek utama yaitu

proses, tantangan, dan dampak pemberdayaan KSM Randu Makmur pada pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Proses Pemberdayaan KSM Randu Makmur pada Pengelolaan Sampah di TPST Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas

Proses pemberdayaan KSM Randu Makmur berlangsung secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Bagian ini memaparkan keterlibatan dan peran berbagai pihak serta tahap pemberdayaan KSM Randu Makmur. Pemaparan mengenai hal tersebut penting untuk memahami secara utuh dan menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dan berperan dalam proses pemberdayaan, serta tahapan pemberdayaan dari awal hingga KSM Randu Makmur dapat berjalan secara mandiri.

a. Keterlibatan dan Peran Berbagai Pihak dalam Proses Pemberdayaan KSM Randu Makmur

Dalam proses pemberdayaan KSM Randu Makmur, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi pihak regulator, fasilitator, serta pemberdaya bagi KSM tersebut. Selain DLH, Pemerintah Desa Kedungrandu berperan dalam perizinan dan fasilitasi pembentukan KSM Randu Makmur serta pendirian TPST Kedungrandu, dengan turut mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat, membentuk pengurus awal melalui musyawarah desa, serta mengarahkan masyarakat agar berlangganan layanan pengelolaan sampah melalui KSM tersebut. Masyarakat umum maupun masyarakat yang bergabung dan berlangganan layanan pengelolaan sampah dengan KSM Randu Makmur juga berperan dalam mendukung keberhasilan proses pemberdayaan. Selain itu, terdapat pihak swasta sebagai pihak yang bekerja sama dengan KSM Randu Makmur dalam membeli dan memanfaatkan produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah oleh KSM tersebut. Dengan demikian, proses pemberdayaan KSM Randu Makmur tidak terlepas dari keterlibatan, peran, dan dukungan berbagai pihak.

b. Tahap Persiapan Pemberdayaan KSM Randu Makmur

Proses pemberdayaan KSM Randu Makmur diawali dengan tahap persiapan melalui pembentukan dan pelatihan pengurus awal sebagai salah satu pihak yang memberdayakan anggota. Pembentukan pengurus awal dilakukan dengan musyawarah desa (musdes) di kantor kepala Desa Kedungrandu. Melalui proses penjurangan dalam musyawarah tersebut terpilih empat pengurus awal yang kemudian diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas untuk disahkan. Setelah terbentuk, pengurus awal mengikuti kegiatan *study tour* ke Malang dan Surabaya serta kegiatan pembinaan di kantor DLH Kabupaten Banyumas untuk mempelajari tata cara pengelolaan sampah. Setelah mengikuti berbagai proses belajar tersebut, pengurus awal berwenang untuk ikut memberdayakan masyarakat sekitar TPST Kedungrandu termasuk pemulung terdampak penutupan TPA Gunung Tugel menjadi anggota KSM Randu Makmur.

c. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Proses pemberdayaan KSM Randu Makmur pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada calon anggota KSM. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan perekrutan anggota KSM Randu Makmur serta menyadarkan dan mengajak masyarakat termasuk pemulung terdampak penutupan TPA Gunung Tugel untuk bersedia bergabung menjadi anggota KSM tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari

pengurus awal, Pemerintah Desa Kedungrandu, hingga tokoh masyarakat. Sosialisasi dilakukan beberapa kali melalui musyawarah di tingkat dusun (musdus), pertemuan RT dan RW, serta pertemuan langsung dengan masyarakat seperti anggota yang ditawarkan secara langsung oleh ketua KSM Randu Makmur. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui undangan tertulis yang dibagikan kepada masyarakat. Informasi tersebut menyebar secara informal dari mulut ke mulut, sehingga ada yang mengetahuinya dari teman-teman pemulung dan keluarga yang sudah lebih dulu bekerja di KSM Randu Makmur.

Setelah sosialisasi dilakukan dan masyarakat, termasuk pemulung bersedia untuk bergabung, tahap berikutnya adalah pendaftaran anggota KSM Randu Makmur yang dilakukan di TPST Kedungrandu dengan membawa kartu identitas. Pada masa awal pendaftaran tidak dilakukan seleksi ketat, siapapun yang mendaftar asalkan mengetahui cara memilah sampah maka langsung diterima. Pada awal operasionalnya, jumlah anggota KSM Randu Makmur sempat hampir mencapai 100 orang karena kebutuhan tenaga kerja yang tinggi dan volume sampah yang dikelola juga besar. Dengan demikian, proses pendaftaran ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat termasuk mantan pemulung yang ingin berpartisipasi dan diberdayakan menjadi anggota KSM Randu Makmur.

d. Tahap Awal Pengelolaan Sampah oleh KSM Randu Makmur

Ketika pertama kali bergabung, anggota KSM Randu Makmur sempat mengelola sampah hanya dengan menumpuk dan memilah sampah secara manual karena fasilitas di TPST Kedungrandu masih sangat terbatas. Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak NI selaku anggota KSM Randu Makmur:

“Kalo dulu kan belum ada mesin seperti ini ya, awalnya ditumpuk kan. Saya memilih itu, rongsok-rongsok itu loh yang ditumpuk sampe seperti gunung di situ loh.”
(Wawancara dengan Bapak NI pada 20 Agustus 2025)

Kemudian, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas selaku fasilitator memberikan mesin conveyer feeder dan mesin-mesin lainnya sesuai kebutuhan pengelolaan sampah. Dengan demikian, perkembangan fasilitas secara bertahap membuat proses pelatihan dan pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi semakin lancar melalui penggunaan berbagai mesin.

e. Tahap Transformasi Kemampuan

Setelah dilakukan pengadaan fasilitas, anggota KSM Randu Makmur menjalankan tahap transformasi kemampuan melalui kegiatan pengarahan dan pelatihan agar dapat memahami tugas masing-masing, bekerja sesuai prosedur dan aturan kerja, serta menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Mereka seringkali dikumpulkan terlebih dahulu untuk diberikan pengarahan sebelum bekerja, yang mencakup pembagian kerja, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak RO selaku anggota KSM Randu Makmur:

“Training, dilatihnya. Menempatkan orang-orangnya itulah supaya kerjanya di bagian sini bagian sini, kaya gini. Orang ini khusus mesin, orang ini khusus nyupir, kaya gitu.” (Wawancara dengan Bapak RO pada 15 Agustus 2025).

Proses pengarahan dan pelatihan anggota KSM Randu Makmur berfokus pada teknis kerja sesuai prosedur dan aturan kerja, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam hal ini, anggota KSM mendapatkan pelatihan teknis dari pengurus KSM, Dinas Lingkungan Hidup

(DLH), dan Bupati Banyumas beberapa kali, di mana anggota KSM diajarkan sekaligus praktik langsung di TPST Kedungrandu. Selain kemampuan teknis, anggota KSM juga dibekali pemahaman mengenai kesehatan dan keselamatan kerja oleh pengurus KSM. Dengan demikian, proses pengarahan dan pelatihan anggota KSM Randu Makmur dilakukan beberapa kali dengan melibatkan berbagai pihak.

f. Tahap Pendampingan KSM Randu Makmur

Pada awal operasionalnya, KSM Randu Makmur didampingi dari pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup sebelum akhirnya dapat berjalan mandiri. Pendampingan berlangsung selama sekitar lima bulan, terhitung sejak proses pembentukan pengurus awal. Pendampingan ini mencakup pendampingan teknis harian serta bantuan finansial. Bapak W selaku ketua KSM Randu Makmur menjelaskan:

“Sekitar lima bulan. Yang namanya pendampingan itu bentuknya subsidi. Pendampingan upah lah, pembayaran, atau honor. Bukan untuk mendampingi kerja atau aktivitas, bukan. Yang mendampingi saat beraktivitas tidak dilakukan setiap hari. Bahasa di sini pendampingan bukan mendampingi orang beraktivitas full, misalnya dari awal hingga akhir atau dari pagi sampai sore itu engga. Yang dimaksud dengan pendampingan di sini itu semacam bantuan subsidi dari pemerintah.” (Wawancara dengan Bapak W pada 18 Agustus 2025).

Pada awal operasionalnya, KSM tersebut mendapatkan bantuan finansial dari DLH sebesar satu juta per orang untuk pembayaran gaji anggota dan pengurus awal. Selain bantuan finansial, pendampingan juga dilakukan melalui pengawasan dari DLH untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai prosedur serta memberikan peringatan jika ada yang tidak sesuai. Berbagai pendampingan tersebut mendorong keberhasilan KSM Randu Makmur dalam mencapai kemandirian dari sisi tata kelola maupun finansial.

g. Tahap Peningkatan Kemampuan

Pada proses pemberdayaan KSM Randu Makmur, tahap peningkatan kemampuan meliputi kerja sama dengan pelanggan, pengelolaan sampah menggunakan mesin, serta kerja sama dengan pihak lain untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Setelah melalui proses pengarahan, pelatihan, serta pendampingan teknis dan finansial dari pemerintah, pengurus dan anggota KSM Randu Makmur menjalin hubungan dengan masyarakat yang diawali dengan kegiatan sosialisasi untuk memberikan informasi terkait pola pengelolaan sampah dan mengajak masyarakat agar berlangganan dengan KSM tersebut. Dalam sosialisasi juga biasanya dilakukan musyawarah untuk merundingkan dan menyepakati biaya, metode, serta frekuensi pengambilan sampah. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam bentuk MOU (Memorandum of Understanding).

Setelah memiliki banyak pelanggan, KSM Randu Makmur melakukan pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu secara mandiri menggunakan mesin, termasuk secara mandiri dalam hal finansial. Anggota KSM Randu Makmur yang mayoritas merupakan mantan pemulung TPA Gunung Tugel juga mampu melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan arahan sebelumnya. Pengelolaan sampah oleh KSM Randu Makmur dilakukan secara bertahap dengan menggunakan berbagai alat dan mesin yang tersedia. Dalam satu hari, rata-rata sampah yang dikelola oleh KSM tersebut adalah 15 ton.

Gambar 1. Pemilahan Sampah Secara Manual Menggunakan Mesin *Conveyor Feeder*



Sumber: Hasil Observasi, 2025

Pengelolaan sampah oleh KSM Randu Makmur tidak hanya berfokus pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai ekonomis yang dipasarkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Sampah anorganik (rongsok) seperti kertas, botol, dan kaleng dibeli oleh para pengepul untuk didaur ulang di berbagai industri. Maggot untuk pakan ternak dan kompos kasgot dari kotoran maggot dibeli oleh DLH dan PT Green Frosa. Kemudian, Refuse Derived Fuel (RDF) hasil cacahan plastik dibeli oleh PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Cilacap dan PT Semen Bima Banyumas sebagai bahan bakar alternatif. Plastik hasil pilahan menggunakan mesin gibrig juga dibeli oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Banyumas sebagai bahan produksi paving plastik, genteng plastik, dan sebagainya. Penjualan produk-produk tersebut menjadi sumber pemasukan bagi KSM Randu Makmur selain dari iuran pelanggan.

h. Tahap Pengawasan dan Evaluasi

Tahap ini meliputi pengawasan dan evaluasi dari pemerintah serta pengawasan dan evaluasi internal KSM Randu Makmur. Pengawasan dan evaluasi KSM Randu Makmur dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah tetap sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku pihak regulator dan fasilitator melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap KSM Randu Makmur melalui pertemuan di Kantor DLH bersama bupati, jajaran terkait, dan KSM-KSM lain serta melalui kunjungan langsung ke TPST Kedungrandu dengan waktu yang fleksibel untuk mengecek kelengkapan, penggunaan, perawatan, dan perbaikan fasilitas.

Selain dari DLH, pengurus KSM Randu Makmur juga melakukan pengawasan dan evaluasi internal. Dalam hal ini, ketua KSM senantiasa berada di hanggar untuk mengawasi dan memastikan kelancaran kegiatan pengelolaan sampah. Kemudian, evaluasi internal KSM dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan seperti terkait layanan pengambilan dan pengangkutan sampah ketika ada keluhan pelanggan atau kendala teknis di lapangan. Kemudian, adanya MOU antara KSM Randu Makmur dan pelanggan juga berfungsi sebagai bahan evaluasi apabila terjadi ketidaksesuaian.

Tantangan Pemberdayaan KSM Randu Makmur pada Pengelolaan Sampah di TPST Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas

Dalam proses pemberdayaan KSM Randu Makmur, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi meliputi tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berasal dari dalam KSM sedangkan tantangan eksternal berasal dari luar KSM. Pemaparan mengenai kedua jenis tantangan tersebut penting untuk memahami dinamika pemberdayaan KSM Randu Makmur yang memengaruhi kelancaran operasional beserta upaya menghadapinya.

a. Tantangan Internal yang Dihadapi pada Proses Pemberdayaan KSM Randu Makmur

Tantangan internal meliputi adaptasi anggota terhadap perubahan budaya kerja, adaptasi anggota terhadap pembagian kerja, hambatan operasional dalam pengelolaan sampah, dan keberlanjutan pengelolaan sampah. Adaptasi anggota KSM Randu Makmur terhadap perubahan budaya kerja menjadi tantangan internal yang dihadapi pada proses pemberdayaan KSM tersebut mengingat mayoritas anggota merupakan mantan pemulung TPA Gunung Tugel. Latar belakang pekerjaan sebelumnya membuat mereka terbiasa bekerja tanpa prosedur dan aturan sehingga perlu penyesuaian terhadap budaya kerja yang lebih terstruktur. Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan juga terjadi dalam proses pemberdayaan anggota sehingga dilakukan pengarahan dan pelatihan serta pendampingan berkelanjutan mengenai prosedur dan aturan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, tantangan juga dirasakan ketika anggota harus beradaptasi dengan penggunaan mesin yang sebelumnya belum pernah mereka gunakan. Oleh karena itu, mereka melakukan latihan berulang hingga terbiasa bekerja dengan lancar. Dukungan psikologis juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri, seperti dialami oleh anggota yang sempat ragu tetapi akhirnya mampu menyesuaikan diri hingga terbiasa.

Tantangan internal berikutnya yaitu adaptasi anggota KSM Randu Makmur terhadap pembagian kerja yang ditentukan oleh pengurus sesuai kebutuhan KSM sehingga di setiap KSM berbeda-beda. Anggota KSM Randu Makmur tidak selalu dapat memilih bagian kerja dan perlu beradaptasi dengan bagian yang diberikan. Pembagian kerja juga mempertimbangkan faktor jenis kelamin, misalnya laki-laki di bagian pengangkutan dan perempuan di bagian pemilahan. Pada bagian tertentu seperti pengangkutan, pengurus biasanya menanyakan terlebih dahulu kemampuan anggota, misalnya siapa yang bisa mengendarai kendaraan roda tiga dan truk. Selain itu, terdapat rotasi bagian kerja yang menuntut anggota untuk kembali beradaptasi apalagi jika sudah merasa nyaman di bagian sebelumnya. Rotasi dilakukan apabila kinerja dianggap kurang optimal atau kebutuhan KSM berubah. Dalam menghadapi rotasi tersebut, anggota berupaya menyesuaikan diri, meyakinkan diri, dan mempertahankan motivasi kerja.

Kemudian, dalam pengelolaan sampah oleh KSM Randu Makmur terdapat beberapa hambatan operasional yang menjadi tantangan tersendiri seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin dan kendaraan, serta keterlambatan pengangkutan sampah. Ibu M selaku anggota yang bertugas di bagian pemilahan mengatakan:

“Tantangannya di sini ya kena beling, kena paku, sindik sate.” (Wawancara dengan Ibu M pada 11 Agustus 2025).

Benda-benda keras yang masuk ke dalam mesin gibrig juga berpotensi membahayakan pekerja. Risiko meningkat seiring dengan banyaknya sampah. Kecelakaan kerja yang pernah

terjadi bersifat ringan dan dapat segera ditangani dengan obat-obatan yang tersedia di TPST Kedungrandu. Selain itu, pernah terjadi kerusakan mesin dan kendaraan, serta keterbatasan tenaga kerja ketika ada yang tidak berangkat, yang menyebabkan penumpukan sampah dan keterlambatan pengangkutan sampah karena tenaga pengangkut terlebih dahulu membantu pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu.

Selain itu, keberlanjutan pengelolaan sampah oleh KSM Randu Makmur juga menjadi tantangan penting, apalagi saat ini KSM tersebut sudah mengelola keuangannya sendiri. Untuk menjaga keberlanjutan, KSM Randu Makmur senantiasa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas sebagai regulator. Keberlanjutan pengelolaan sampah juga terkendala oleh keterlambatan pembayaran iuran dari pelanggan, yang berpengaruh pada kelancaran pembayaran gaji anggota dan pengurus. Dalam kondisi tersebut, pengurus menggunakan hasil penjualan rongsok untuk menutup sementara kebutuhan gaji sehingga dapat menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah oleh KSM Randu Makmur.

b. Tantangan Eksternal yang Dihadapi pada Proses Pemberdayaan KSM Randu Makmur

Tantangan eksternal meliputi penolakan dari pemulung untuk menjadi anggota KSM, penolakan dari masyarakat untuk menjadi pelanggan KSM, keluhan masyarakat sekitar TPST Kedungrandu, keluhan pelanggan KSM, serta keterbatasan akses untuk pengambilan dan pengangkutan sampah. Pada saat proses sosialisasi dan perekrutan anggota KSM Randu Makmur, muncul berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk pemulung, Salah satunya adalah penolakan dari beberapa pemulung untuk bersedia bergabung menjadi anggota karena tidak ingin terikat aturan. Untuk mengatasinya, pengurus KSM Randu Makmur terus berusaha mengajak dan memberikan pemahaman mengenai manfaat bergabung, seperti peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi serta jaminan kesehatan.

Tantangan eksternal berikutnya adalah penolakan masyarakat terhadap KSM Randu Makmur sebagai pelanggan. Selain menghadapi penolakan dari pemulung, KSM Randu Makmur juga menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat yang enggan menjadi pelanggan karena memiliki pekarangan untuk membakar sampah atau merasa keberatan membayar iuran. Penolakan tersebut lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Untuk mengatasinya, pengurus KSM Radnu Makmur melakukan sosialisasi dan komunikasi secara berkelanjutan serta mempermudah mekanisme pembayaran iuran melalui koordinator wilayah.

Kemudian, tantangan eksternal juga berkaitan dengan keluhan masyarakat. KSM Randu Makmur menghadapi keluhan dari masyarakat sekitar TSPT Kedungrandu, terutama pada awal operasional. Keluhan tersebut disebabkan oleh adanya bau dari tumpukan sampah akibat fasilitas pengolahan sampah masih terbatas. Keluhan tersebut ditindaklanjuti dengan pengadaan fasilitas secara bertahap. Meskipun fasilitas sudah bertambah, keluhan kembali muncul terutama ketika volume sampah banyak dan menumpuk. Dalam kondisi ini, sampah hasil pilahan menggunakan mesin gibrig ditampung sementara di belakang TPST Kedungrandu karena Tempat Pengolahan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) juga sedang penuh. Hal tersebut juga kembali menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar TPST Kedungrandu. Dalam kondisi tersebut, KSM menjalin komunikasi secara langsung dengan masyarakat sekitar dan segera mengangkut sampah ke dalam hanggar maupun TPA BLE.

Selain keluhan masyarakat sekitar, KSM Randu Makmur juga menghadapi keluhan pelanggan akibat keterlambatan pengangkutan sampah saat terjadi kerusakan mesin dan kendaraan, keterbatasan tenaga kerja pada waktu tertentu, kegiatan internal KSM, serta pada hari libur seperti hari raya. Dalam menghadapi keluhan tersebut, tenaga administrasi KSM melakukan konfirmasi kepada pelanggan mengenai alasan keterlambatan dan waktu pengangkutan sampah berikutnya sekaligus menyampaikan permintaan maaf.

Selain itu, KSM Randu Makmur juga menghadapi tantangan eksternal berupa keterbatasan akses pengambilan dan pengangkutan sampah di lokasi pelanggan yang sulit dijangkau kendaraan roda tiga dan truk. Hal tersebut mendorong KSM berupaya menyesuaikan metode pengambilan dan pengangkutan sampah, seperti dengan berjalan kaki ke lokasi pelanggan atau melalui titik penampungan sementara.

Dampak Pemberdayaan KSM Randu Makmur pada Pengelolaan Sampah di TPST Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas

Pemberdayaan KSM Randu Makmur memberikan dampak terhadap individu dan masyarakat serta pada aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dampak tersebut tercermin dari perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah pemberdayaan KSM Randu Makmur, sehingga penting untuk memahami sejauh mana KSM ini memberikan manfaat dan peran, serta menjadi acuan bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sampah ke depannya.

a. Dampak Pemberdayaan KSM Randu Makmur terhadap Individu dan Masyarakat

Pemberdayaan KSM Randu Makmur berdampak pada munculnya perasaan positif pada anggota, pengurus, dan pelanggan KSM. Ketua KSM menilai pemberdayaan membawa dampak positif dan bisa dirasakan, kemudian beberapa anggota yang merupakan mantan pemulung mengaku lebih tenang dan bahagia karena kini memiliki penghasilan tetap serta kehidupan yang lebih layak dibandingkan sebelumnya. Beberapa pelanggan juga merasa lebih nyaman karena sampah rumah tangganya terkontrol dan terkelola dengan baik serta menilai pengelolaan sampah oleh KSM Randu Makmur tidak hanya rutin dan tepat waktu tetapi juga bermanfaat karena menghasilkan beberapa produk. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan KSM Randu Makmur berdampak pada munculnya perasaan positif pada anggota, pengurus, dan pelanggan, seperti rasa tenang, bahagia, dan nyaman. Mereka mengakui bahwa pemberdayaan tersebut berdampak positif.

Kemudian, pemberdayaan KSM Randu Makmur berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri dan kemampuan anggota dan pengurus, terutama bagi anggota yang mayoritas merupakan mantan pemulung di TPA Gunung Tugel. Sebelumnya, mereka merasa malu atau kurang percaya diri karena bekerja sebagai pemulung. Namun, setelah menjadi anggota KSM Randu Makmur yang bekerja secara terorganisasi dengan berbagai fasilitas, mereka menjadi lebih percaya diri dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan kerja. Pengurus juga mengalami peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan kerja dalam mengelola KSM serta menyebarkan praktik baik pengelolaan sampah kepada masyarakat. Hasil observasi pun memperkuat bahwa anggota dan pengurus KSM mampu bekerja dengan percaya diri sesuai bagiannya serta mampu menggunakan alat dan mesin sesuai arahan dan pelatihan yang telah diberikan sebelumnya.

Selain itu, pemberdayaan KSM Randu Makmur juga berdampak pada tercapainya kemandirian dan prestasi KSM tersebut. Pendampingan teknis dan finansial dari Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, kerja sama dengan pelanggan dalam pengelolaan sampah, serta kerja sama dengan pihak lain berdampak pada tercapainya kemandirian dan prestasi KSM Randu Makmur. KSM tersebut telah dilepas untuk berpikir dan bekerja secara mandiri serta telah mampu menghasilkan uang sendiri dari proses pengelolaan sampah yang dilakukan. Selain mencapai kemandirian, berbagai pengawasan dan evaluasi juga membuat KSM Randu Makmur senantiasa melakukan upaya perbaikan hingga dapat meraih prestasi. Mayoritas anggota KSM yang merupakan mantan pemulung kini mampu menjalankan tugas pengelolaan sampah dengan lebih terorganisir, menjaga keberlanjutan KSM, hingga menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berhasil di Kabupaten Banyumas. Bahkan banyak akademisi, peneliti, media, dan pemerintah daerah lain yang berkunjung ke TPST Kedungrandu untuk mempelajari pengelolaan sampah oleh KSM Randu Makmur.

b. Dampak Pemberdayaan KSM Randu Makmur pada Aspek Sosial

Pemberdayaan KSM Randu Makmur juga berdampak pada aspek sosial yang meliputi teratasinya konflik sosial terkait penutupan TPA Gunung Tugel, perubahan status sosial anggota KSM, meningkatnya akses jaminan sosial anggota KSM, meningkatnya interaksi sosial internal KSM, meningkatnya interaksi sosial KSM dengan masyarakat, termasuk pelanggan, serta timbulnya kecemburuan sosial. Sebelum adanya pemberdayaan KSM Randu Makmur, sampah hanya dibuang di TPA Gunung Tugel dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Kondisi TPA yang kelebihan kapasitas menimbulkan pencemaran sehingga memicu konflik sosial berupa aksi protes yang menuntut penutupan TPA. Sementara itu, masyarakat sekitar TPA cenderung tidak melakukan protes karena banyak yang bekerja sebagai pemulung, sehingga keberadaan TPA justru menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Dari aksi protes tersebut, TPA Gunung Tugel akhirnya ditutup dan ditindaklanjuti dengan kebijakan pengelolaan sampah melalui pembangunan TPST Kedungrandu di bekas TPA serta pemberdayaan masyarakat, termasuk pemulung terdampak penutupan TPA yang menjadi KSM Randu Makmur sebagai pengelola TPST Kedungrandu. Melalui kebijakan tersebut, aksi protes masyarakat yang menuntut maupun menolak penutupan TPA dapat dihentikan.

Dampak pada aspek sosial berikutnya yaitu perubahan status sosial anggota KSM Randu Makmur yang mayoritas merupakan mantan pemulung di TPA Gunung Tugel. Sebelumnya mereka bekerja sebagai pemulung liar yang tidak terorganisir. Setelah bergabung dan diberdayakan dalam KSM Randu Makmur, status sosial mereka berubah menjadi pekerja resmi dalam kelompok pengelola sampah dengan penghasilan yang lebih stabil. Perubahan status sosial diikuti dengan peningkatan rasa percaya diri dan kebanggaan serta perubahan budaya kerja dari yang fleksibel dan tidak terikat aturan menjadi lebih terstruktur sesuai pembagian kerja serta prosedur dan aturan yang berlaku. Hasil observasi memperkuat bahwa mereka bekerja sesuai waktu yang ditentukan serta menggunakan seragam dan alat pelindung diri.

Perubahan status sosial anggota KSM Randu Makmur juga diikuti oleh meningkatnya akses mereka terhadap jaminan sosial. Sebelumnya, sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pemulung di TPA Gunung Tugel tanpa jaminan sosial. Setelah bergabung sebagai anggota KSM Randu Makmur, mereka terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapatkan

jaminan sosial dan berbagai program bantuan, termasuk jaminan kecelakaan dan kematian yang ditanggung penuh oleh KSM tanpa potongan gaji.

Perubahan status sosial dan budaya kerja anggota KSM Randu Makmur juga diikuti oleh meningkatnya interaksi sosial di dalam KSM, baik antaranggota, antarpengurus, maupun antara anggota dan pengurus. Hubungan di dalam KSM cenderung harmonis dan akrab, ditandai dengan komunikasi yang intensif serta koordinasi yang lancar, termasuk dalam hal pengangkutan sampah. Adanya prosedur dan aturan kerja yang konsisten, yang diinformasikan dan diingatkan oleh pengurus kepada anggota, turut memperkuat interaksi sosial. Kondisi ini berbeda dengan ketika anggota masih menjadi pemulung liar yang bekerja secara mandiri tanpa pembagian kerja, koordinasi, prosedur dan aturan kerja yang jelas. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa seluruh anggota dan pengurus KSM Randu Makmur saling mengenal, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, kegiatan coffee break dan waktu istirahat semakin mempererat kebersamaan serta interaksi sosial di dalam organisasi.

Selain interaksi sosial internal, pemberdayaan KSM Randu Makmur juga berdampak pada meningkatnya interaksi sosial dengan masyarakat, termasuk pelanggan. Interaksi tersebut terjalin melalui kegiatan sosialisasi dan musyawarah dengan calon pelanggan, kunjungan berbagai pihak ke TPST Kedungrandu, komunikasi langsung antara anggota KSM dan pelanggan saat pengangkutan sampah, serta komunikasi antara ketua dan tenaga administrasi dengan koordinator wilayah pelanggan. Interaksi sosial KSM Randu Makmur dengan pelanggan juga diwarnai sedikit ketegangan, seperti ketika terjadi keterlambatan pengangkutan sampah yang menimbulkan keluhan pelanggan. Meskipun begitu, kedua belah pihak dapat saling memahami melalui komunikasi yang terbuka dan sikap yang kooperatif.

Selain menimbulkan berbagai dampak positif, pemberdayaan KSM Randu Makmur juga menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat yang belum bergabung maupun dari kalangan internal KSM. Kecemburuan ini muncul karena sebagian masyarakat ingin turut serta dalam pengelolaan sampah atau menjadi pengurus KSM, tetapi belum memiliki kesempatan. Dengan demikian, meskipun sebagian besar dampak pemberdayaan KSM Randu Makmur bersifat positif, timbulnya kecemburuan sosial menunjukkan bahwa pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari dampak negatif sebagai konsekuensi dari perubahan sosial. Namun demikian, kecemburuan yang muncul masih dalam batas wajar dan tidak sampai menghambat keberlanjutan KSM.

c. Dampak Pemberdayaan KSM Randu Makmur pada Aspek Ekonomi

Pemberdayaan KSM Randu Makmur juga berdampak pada aspek ekonomi, seperti terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk pemulung, serta membaiknya kondisi ekonomi anggota KSM tersebut. Pemberdayaan KSM Randu Makmur membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat sekitar, terutama para pemulung yang sebelumnya menggantungkan hidup pada TPA Gunung Tugel. Dengan beralihnya pengelolaan sampah ke TPST Kedungrandu yang berada di bekas TPA Gunung Tugel, para pemulung kemudian diberdayakan menjadi anggota KSM Randu Makmur sebagai pengelola sampah di TPST tersebut. Kesempatan kerja tidak hanya terbuka bagi pemulung, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang belum memiliki pekerjaan tetap.

Selain itu, pemberdayaan KSM Randu Makmur juga berdampak pada perbaikan kondisi ekonomi anggota yang mayoritas sebelumnya bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan yang tidak menentu. Setelah menjadi anggota KSM Randu Makmur, penghasilan mereka menjadi lebih stabil sehingga mampu membantu perekonomian keluarga. Membaiknya kondisi ekonomi anggota KSM Randu Makmur didorong oleh adanya sistem gaji bulanan berdasarkan jumlah hari kerja serta penerapan kebijakan terkait absensi saat sakit yang memberikan rasa aman dan jaminan, meskipun mengalami kendala kesehatan.

d. Dampak Pemberdayaan KSM Randu Makmur pada Aspek Lingkungan

Pemberdayaan KSM Randu Makmur juga berdampak pada aspek lingkungan karena TPA Gunung Tugel dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan telah ditutup dan diganti dengan TPST Kedungrandu yang dikelola oleh KSM tersebut. Anggota KSM Randu Makmur yang mayoritas merupakan mantan pemulung telah diberdayakan untuk mengelola sampah secara terorganisir sehingga mampu mengatasi dampak negatif dan menimbulkan dampak positif pada aspek lingkungan yang meliputi: meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, meningkatnya kebersihan lingkungan, menurunnya risiko bencana akibat sampah, serta membaiknya kondisi jalan di sekitar TPST Kedungrandu. Pemberdayaan KSM Randu Makmur berdampak pada meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, baik bagi masyarakat yang bergabung maupun yang berlangganan dengan KSM tersebut. Masyarakat yang awalnya tidak peduli kini menjadi lebih peduli terhadap sampah dan lingkungannya, bahkan pelanggan langsung menyampaikan keluhan jika sampah menumpuk agar segera diangkut. Meskipun pelanggan belum mengelola sampah sendiri, ia sudah terbiasa mengumpulkan sampah dan berinisiatif menyediakan tong sampah di rumahnya untuk mempermudah pengangkutan sampah oleh anggota KSM.

Pemberdayaan KSM Randu Makmur juga berdampak pada meningkatnya kebersihan lingkungan, khususnya di Desa Kedungrandu. Ketika TPA Gunung Tugel masih beroperasi, lingkungan desa tergolong kumuh, berantakan, dan menimbulkan bau menyengat, sedangkan saat ini lingkungan menjadi lebih bersih dan rapi karena sampah dikelola dengan baik oleh KSM Randu Makmur. Kebersihan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh anggota dan pengurus KSM tetapi juga oleh pelanggan KSM karena sampah tidak lagi menumpuk atau tercecer, melainkan diambil secara rutin oleh anggota KSM. Hasil observasi juga memperkuat bahwa kondisi lingkungan Desa Kedungrandu, termasuk di sekitar TPST Kedungrandu yang merupakan bekas TPA Gunung Tugel, sudah lebih bersih, rapi, dan bebas dari tumpukan sampah yang menggantung.

Dampak pemberdayaan KSM Randu Makmur pada aspek lingkungan berikutnya yaitu menurunnya risiko bencana yang sebelumnya sering terjadi akibat penumpukan sampah di TPA Gunung Tugel, seperti longsor pada musim hujan dan kebakaran pada musim kemarau. Ketika TPA Gunung Tugel ditutup, pun masih sempat terjadi kebakaran akibat kondisi sampah yang kering lebih mudah terbakar. Setelah TPA tersebut diganti dengan TPST Kedungrandu melalui pengelolaan sampah yang terorganisir oleh KSM Randu Makmur, tumpukan sampah yang tidak terkelola semakin berkurang dan risiko terjadinya bencana akibat sampah dapat menurun.

Selain itu, pemberdayaan KSM Randu Makmur juga berdampak pada perbaikan kondisi jalan di sekitar TPST Kedungrandu. Ketika TPA Gunung Tugel masih beroperasi, kondisi jalan di

sekitarnya becek, kotor, dan berbau, sehingga menghambat akses dan membuat masyarakat enggan melaluinya. Setelah TPA tersebut ditutup dan diganti dengan TPST Kedungrandu yang dikelola oleh KSM Randu Makmur, kondisi jalan di sekitarnya menjadi semakin bersih dan tidak lagi bau menyengat karena tidak ada lagi tumpukan sampah yang tidak terkelola. Oleh karena itu, masyarakat merasa lebih nyaman dan lebih mudah melintasi jalan di sekitar TPST Kedungrandu.

e. Dampak Pemberdayaan KSM Randu Makmur pada Aspek Kesehatan

Pemberdayaan KSM Randu Makmur juga berdampak pada aspek kesehatan. TPA Gunung Tugel yang sebelumnya menimbulkan berbagai masalah kesehatan telah ditutup dan diganti dengan TPST Kedungrandu yang dikelola oleh KSM Randu Makmur, sehingga mampu mengatasi dampak negatif dan menimbulkan dampak positif pada aspek kesehatan, seperti menurunnya risiko terpapar penyakit akibat sampah serta meningkatnya akses layanan kesehatan bagi anggota KSM. Ketika TPA tersebut masih beroperasi, sering menimbulkan berbagai keluhan bagi masyarakat, termasuk pemulung, seperti gatal-gatal, batuk, sakit kepala, bahkan penyakit menular seperti demam berdarah. Saat ini, kondisi kesehatan anggota KSM Randu Makmur lebih baik, dan penampilan mereka pun lebih bersih serta sehat dibandingkan saat masih menjadi pemulung. Hal tersebut didorong oleh adanya aturan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, dan sepatu yang didukung dengan sosialisasi dari Puskesmas Patikraja.

Pemberdayaan KSM Randu Makmur juga berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan bagi anggotanya. Saat ini seluruh anggota KSM Randu Makmur telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan sehingga mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin dari Puskesmas Patikraja setiap 2 – 3 bulan sekali pada pagi hari di kantor TPST Kedungrandu. Pemeriksaan tersebut kerap disertai dengan sosialisasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, bahkan pernah dilakukan pemeriksaan khusus seperti deteksi kanker pada perempuan. Dengan demikian, meskipun pekerjaan anggota KSM Randu Makmur masih berhubungan langsung dengan sampah akan tetapi kondisi kesehatan anggota lebih terpantau sehingga risiko terpapar penyakit akibat sampah dapat ditekan dan kondisi kesehatan mereka maupun masyarakat sekitar meningkat.

Pemberdayaan KSM Randu Makmur dalam pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu sejalan dengan salah satu teori pemberdayaan masyarakat, yaitu Teori ACTORS yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (1996, dalam Maani, 2011). Teori ACTORS menekankan pemberian ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta bersinergi dalam upaya menanggulangi pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan (Maani, 2011:54-55). Selain itu, teori ACTORS lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan membebaskan seseorang dari kendali kaku dan memberikan orang tersebut kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusan, dan tindakan-tindakannya (Afriansyah, et al., 2023:23). Salah satu pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat yang memberikan ruang dan kesempatan lebih besar kepada rakyat yaitu pemberdayaan KSM Randu Makmur yang juga menunjukkan bagaimana kelompok masyarakat marginal seperti pemulung dilibatkan, diberdayakan, dan bertransformasi menjadi subjek aktif pada kegiatan pengelolaan sampah dalam rangka mengatasi darurat sampah dan banyaknya pemulung terdampak penutupan TPA Gunung Tugel.

Pengelolaan sampah oleh KSM Randu Makmur merupakan kelanjutan dan perkembangan dari proses pemberdayaan KSM tersebut. Selain berbagai proses yang dialami, pemberdayaan KSM Randu Makmur juga menghadapi berbagai tantangan dan menimbulkan dampak. Proses pemberdayaan KSM Randu Makmur melibatkan berbagai pihak dan memiliki tahap yang hampir sama dengan tahap Sulistiyani (2017:83-84), yaitu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, transformasi kemampuan, serta peningkatan kemampuan. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya tahap persiapan pemberdayaan, tahap awal pengelolaan sampah, tahap pendampingan, serta tahap pengawasan dan evaluasi.

Keberhasilan pemberdayaan dalam membangun pemahaman dan keinginan untuk perubahan di masyarakat dapat dinilai dengan menggunakan beberapa kerangka kerja dari teori ACTORS (Hardiansyah, et al., 2023:127). Oleh karena itu, teori ACTORS diaplikasikan pada penelitian ini untuk menganalisis proses, tantangan, dan dampak pemberdayaan KSM Randu Makmur dalam pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu, dengan menemukan kesesuaian teori ACTORS beserta indikator input dan output-nya. Indikator input yang meliputi authority (wewenang), confidence and competence (kepercayaan diri dan kemampuan), trust (keyakinan), opportunities (kesempatan), responsibilities (tanggung jawab), dan support (dukungan) secara garis besar relevan dengan proses dan upaya menghadapi tantangan pemberdayaan KSM Randu Makmur, meskipun terdapat hal yang tidak sepenuhnya relevan, yaitu antara indikator opportunities dan tantangan internal berupa adaptasi anggota KSM Randu Makmur terhadap pembagian kerja yang lebih banyak ditentukan oleh pengurus sesuai kebutuhan KSM. Kemudian, indikator output (hasil) teori ACTORS yang meliputi self-respect (pengakuan diri), self-confident (rasa percaya diri), dan self-reliance (kemandirian) relevan dengan dampak pemberdayaan KSM Randu Makmur, terutama terhadap individu dan masyarakat, yang meliputi meningkatnya perasaan positif anggota, pengurus, dan pelanggan KSM; meningkatnya kepercayaan diri dan kemampuan anggota serta pengurus KSM; serta tercapainya kemandirian dan prestasi KSM Randu Makmur.

Simpulan

Pemberdayaan KSM Randu Makmur dalam pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu menunjukkan bagaimana kelompok masyarakat marjinal, seperti pemulung, dilibatkan, diberdayakan, dan bertransformasi menjadi subjek aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah untuk mengatasi darurat sampah serta banyaknya pemulung yang terdampak penutupan TPA Gunung Tugel. KSM tersebut dibentuk sebagai pihak yang diberdayakan atau kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat marjinal dalam pengelolaan sampah. Proses pemberdayaan KSM tersebut melibatkan berbagai pihak dan memiliki tahap yang hampir sama dengan tahap Sulistiyani (2018:83-84), yaitu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, transformasi kemampuan, serta peningkatan kemampuan. Namun hal yang menarik adalah hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya beberapa tahap lain, yang meliputi: 1) tahap persiapan dengan pembentukan dan pelatihan pengurus awal, 2) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku dengan sosialisasi kepada calon anggota dan pendaftaran anggota, 3) tahap awal pengelolaan sampah secara manual hingga pengadaan fasilitas, 4) tahap transformasi kemampuan dengan pengarahan dan pelatihan anggota, 5) tahap pendampingan dengan pendampingan teknis dan finansial dari pemerintah, 6) tahap peningkatan kemampuan melalui kerja sama dengan pelanggan, pengelolaan sampah menggunakan mesin, serta kerja sama dengan pihak lain untuk memasarkan produk, dan 7) tahap pengawasan dan evaluasi dari pemerintah serta secara internal KSM.

Dalam proses pemberdayaan KSM Randu Makmur, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan internal meliputi adaptasi anggota terhadap perubahan budaya kerja, adaptasi anggota terhadap pembagian kerja, hambatan operasional dalam pengelolaan sampah, serta keberlanjutan pengelolaan sampah. Sementara itu, tantangan eksternal meliputi penolakan dari pemulung untuk menjadi anggota, penolakan dari masyarakat untuk menjadi pelanggan, keluhan masyarakat sekitar TPST Kedungrandu, keluhan pelanggan, serta keterbatasan akses pengangkutan sampah. Pemberdayaan KSM Randu Makmur dalam pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu memberikan berbagai dampak, meliputi dampak terhadap individu dan masyarakat, serta dampak pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan KSM Randu Makmur tidak hanya meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola sampah, tetapi juga mengubah status dan peran sosial anggota KSM dari pemulung TPA menjadi pengelola sampah di TPST Kedungrandu yang diikuti dengan perubahan budaya kerja.

Daftar Pustaka

- Afriansyah, dkk. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Anggaunitakiranantika, A. (2019). Eksistensi home industry berbasis gender di Kota Malang. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, 4(1), 38-48.
- Anggaunitakiranantika, A. (2022). "Living by Others": Work Performance and Basic Need Fulfillment Among Women Farmworkers. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 1-16.
- Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. California: Sage Publications. Retrived from <https://repository.gctu.edu.gh/files/original/56306612e36527ab7cbe1504d259b344.pdf>
- Fadzoli, T., Subekti, R., & Waluyo. (2023). Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 28-36. DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.444>.
- Fitrah, R.N., Setiawan, B., & Parawangi, A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat bagi Keluarga Pemulung di Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(3), 804-814. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7393>.
- Hayati, L.A. (2024). Memberdayakan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 28-31. DOI: 10.70476/jpkmunisa.v2i2.5.
- Hardiansyah, R., Nurwati, N., & Taftazani, B.M. (2023). Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Desa Tarunajaya. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 125-131. DOI: <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.40141>.
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(1), 77-91. DOI: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1281>
- Jamaludin, A.N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Karsadi. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024. Diakses dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024). Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024. Diakses dari https://sipsn.menlhk.go.id/download/HPSN2024/SE_HPSN_Tahun_2024.pdf.
- Kusuma, D.L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Randu Makmur Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman.
- Lingga, L.J., Yuana, M., Sari, N.A., Syahida, H.N., Sitorus, C., & Shahron. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 12235-12247. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14542>.
- Lukiana, N., Irdiana, S., Darmawan, K., Ariyono, K.Y., Khairullah, M.N., & Chandra, Y.A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(6), 1093-1101. Diakses dari <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>.
- Ma'rup, M., Kurniasih, D., & Tobirin. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Melalui Program Sumpah Beruang (Sulap Sampah Berubah Uang). *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(7), 808-816. DOI: <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i7.3960>.
- Maani, K.D. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi*, 10(1), 53-66. Diakses dari <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1430>.
- Mardikanto, T. & Soebiato, P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Ristanto, B.A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sae Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Sari, P., Lestasi, D., Nazarani, M.M., & Nababan, N.M. (2025). Pemerataan Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Indonesia. *Adijaya: Jurnal Mulidisiplin*, 03(02), 287-301. Diakses dari <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/view/1785>.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Sumber Daya Manusia (Kuantitatif, Kualitatif, dan Studi Kasus. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A.T. (2017). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
- Wahab, R.N. (2017). Upaya Pemberdayaan Pemulung Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Wulandari, A., Razanah, A., Abidah, A.N., Prasetyo, F.A., Fidzikriyah, L.T., Rosmawati, S., & Abdillah, R. (2025). Pemberdayaan Sosial dalam Upaya Meningkatkan Toleransi Distress pada Pemulung. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 125-135. DOI: 10.60126/maras.v3i1.655.

Yanti, E.R., Nardo, R., Mohammad, M., Aulawi, H., Febrianto, A., & Octavia, R. (2024). Pemberdayaan Pemulung Melalui Pengembangan Produk Daur Ulang dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha dan Kesejahteraannya. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 107-117. DOI: <https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i1.218>.

Yulianti, M., Anggraeni, D., & Setiyaningrum, I.F. (2024). Kajian Analisis Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia dan Dampaknya terhadap Kesehatan. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 7, 1226-1233. Diakses dari <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/download/1819/1824>.